

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN INVENTARIS DAN PENGGUNAAN BARANG PADA KANTOR BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Wirna^{1*}, Muhammad Isa Ansyari², Nasrulhaq³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to find out how the implementation of the inventory and use of goods management at the West Sulawesi General Bureau and Equipment. The number of informants is 5 people. The research method used is qualitative with a descriptive type. Data collection techniques through observations, interviews, and documentation. The results of this research showed that there are several problems that make its implementation not optimal namely in the management of State Property is that there is still poor communication of policies for the management of State Property lack of apparatus resources, there are still unscrupulous users os state property who do not have a possitive attitude. Which do not good in managing state property and the bureaucratic structure that still needs to be improved needs to be rearranged in order to optimize the performance and division managing state property at the Office of the General and Equipment Bureau of West Sulawesi.

Keywords: *implementation, inventory of management*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi pengelolaan inventaris dan penggunaan barang pada Kantor Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengalami beberapa masalah yang membuat pelaksanaannya belum optimal yakni dalam Pengelolaan Barang Milik Negara adalah masih terjadinya komunikasi yang kurang baik dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara, kekurangan sumber daya aparatur, masih didapati oknum pengguna barang milik negara yang belum memiliki sikap yang belum baik dalam pengelolaan barang milik negara dan struktur birokrasi yang masih harus diperbaiki perlu disusun kembali guna mengoptimalkan kinerja dan pembagian tugas-tugas pengelolaan barang milik negara di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: implementasi, pengelolaan inventaris barang

* wirna@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses siklus kebijakan publik yang berkesinambungan dengan proses lainnya dalam mencapai tujuan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah praktik atas kebijakan yang telah dibuat untuk diterapkan di lingkungan masyarakat dalam mengatasi masalah dan menjadi bentuk intervensi dalam masyarakat. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai proses dimana mentransformasi rencana kebijakan yang telah dibuat ke dalam sebuah tindakan yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Howlett dan Ramesh dalam (Agustino, 2016) yang mengartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dimana melakukan praktik sebuah kebijakan yang berhubungan dengan rencana yang telah dibuat.

Kebijakan publik sebagai bentuk ketentuan dan peraturan yang berlaku mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang memerlukan intervensi dari pemerintah dalam hal pengaturan oleh kebijakan publik ialah Barang Milik Negara (BMN). Hal ini dikarenakan persoalan

BMN adalah persoalan yang riskan jika tidak diatur dengan peraturan yang jelas. Selain itu juga, BMN ini sangat erat kaitannya dengan aset dan kepemilikan Negara.

BMN ini juga dapat diartikan sebagai aset, sarana, dan prasarana yang mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab oleh pelaksana kebijakan dan birokrat. Dengan demikian, BMN harus dikelola dan diatur dengan baik dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian yang dapat menghambat aktivitas dan kegiatan birokrasi yang akan berdampak pada aktivitas masyarakat secara luas.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dapat dipahami bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang. Sesuai peraturan tersebut maka perlu adanya pelaksanaan inventarisasi yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bafadal (2004) bahwa inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik Negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Jadi, inventaris barang ialah salah satu hal

penting yang harus terus dilakukan oleh suatu instansi pemerintah maupun swasta, karena dengan adanya inventarisasi yang baik dan benar maka semua kebutuhan fasilitas peralatan serta barang yang dibutuhkan oleh instansi terkait dapat diketahui dengan cepat.

Inventaris barang merupakan kegiatan pendataan barang sekaligus pengelolaan data persediaan barang yang dimiliki sebuah instansi. Namun eksistensinya belum begitu mendapat perhatian yang mendalam sehingga kedudukan dari inventaris barang belum terlihat secara nyata. Sedangkan seandainya inventaris barang dikelola dengan baik akan memberikan faedah yang besar bagi suatu instansi. Agar laporan persediaan barang lancar dan tidak ada kendala, maka diperlukan adanya sistem komputerisasi cepat dan akurat. Pada umumnya pembuatan laporan inventaris barang kadang masih bersifat manual. Hal ini dirasakan membutuhkan waktu yang lama, apabila dilakukan dengan proses komputerisasi pembuatan laporan inventaris barang akan memudahkan bagian pengelola aset barang untuk melakukan proses pelaporan inventaris barang. Dengan adanya sistem komputerisasi ini diharapkan pelaporan aset barang agar lebih baik lagi. Khususnya dalam

membuat laporan inventaris barang, sehingga dengan sistem komputer yang efisien memungkinkan untuk menghasilkan laporan dalam waktu yang relatif singkat, cepat, tepat dan akurat.

Menurut Astari (2013) ketika suatu instansi menerapkan konsep inventarisasi terstruktur, maka kegiatan manajerial maupun operasional yang berlangsung didalamnya juga akan berjalan dengan efektif. Kita semua tahu bahwa instansi baik pemerintah maupun swasta, dalam kegiatan manajerialnya selalu bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan secara optimal dalam serangkaian kegiatan operasional organisasi suatu instansi, maka akan sangat mempengaruhi kinerja itu sendiri. Singkatnya semakin giat suatu instansi memanfaatkan teknologi informasi yang ada, maka pencapaian tujuan akan tercapai lebih efektif.

Kantor Biro Umum dan Perlengkapan Sulawesi Barat merupakan organisasi pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memerlukan barang inventaris milik/kekayaan Negara untuk kelancaran tugas dan pencapaian tujuan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Keberadaan barang milik/kekayaan Negara memerlukan proses pencatatan, pengkodean dan pelaporan barang untuk mengetahui jumlah barang, penambahan barang yang ada maupun untuk mengetahui laporan mutasi atau penghapusan barang. Inventarisasi barang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan barang dilaksanakan dengan maksimal agar barang dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi setiap pegawai. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan good governance agar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka diperlukan instrument yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara professional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari

perencanaan, pengelolaan/ pemanfaatan dan pengawasannya (Mardiasno,2001).

Berdasarkan hasil observasi di kantor Biro Umum dan Perlengkapan Sulawesi Barat pada tanggal 22 januari 2020 masalah yang sering terjadi yaitu pendataan masih secara manual. Hal ini menyebabkan pengulangan data, sehingga mengakibatkan pencatatan data barang tidak akurat dan tidak efisien. Tidak sebanding antara jumlah pegawai yang ada dengan tanggung jawab yang berat yang harus di laksanakan oleh Bagian Perlengkapan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Peralatan dan Mesin yang harus terus dikelola dengan baik oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Serta banyaknya barang yang harus dikelola oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara juga. Belum lagi Aset Tanah, Irigasi, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan dan lain sebagainya. Permasalahan lainnya yakni BMN yang tergolong aset tetap bergerak ini sering dipindahtempatkan dan dipinjam dari suatu ruangan ke ruangan lainnya tanpa adanya pencatatan dan pemindahan yang teratur dengan pembuatan berita acara serah terima barang. Sehingga pada saat pelaporan barang terdapat hambatan karena posisi barang yang berubah-ubah dari satu ruangan ke

ruangan lain. Dampak yang dihasilkan dari permasalahan ini ialah daftar inventaris ruangan yang selalu berubah dan juga pengelola BMN harus mengidentifikasi atau mencari barang yang berpindah tersebut untuk didata dan dicatat secara ulang. Permasalahan ini akan berpengaruh pada pengelolaan khususnya dalam inventarisasi yang belum optimal, efektif, dan efisien. Juga Dalam proses penginputan dan pelaporan barang inventaris masih dilakukan secara manual sehingga terjadi kesalahan-kesalahan maupun duplikasi data.

Peranan dan keberadaan inventaris ini sangatlah penting karena tanpa adanya inventaris suatu siklus kegiatan kantor dapat terganggu. Hal ini akan berpengaruh terhadap pekerjaan mengakibatkan proses administrasi kurang maksimal. Begitu pentingnya peranan dari inventaris sehingga suatu kantor sangat perlu untuk melakukan pengelolaan barang inventaris mereka secara rutin dan berkala untuk kepentingan data dan informasi inventaris yang dimiliki kantor (Supartha & Pandawa, 2014). Agar kegiatan operasional berjalan dengan lancar, efektif, efisien dibutuhkan sarana dan prasarana tertentu yang harus tersedia. Dengan adanya kegiatan perencanaan, pengadaan, pencatatan

dan pelaporan logistik atau barang guna mendukung efektifitas dan efisiensi dalam tujuan organisasi (Dwiantara dan Sumarno, 2009).

Melihat realita yang terjadi dilapangan, Barang Milik Negara pada Kantor Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat memiliki Proses pengolahan data persediaan barang yang sedang berjalan di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan belum efektif, karena dengan banyaknya barang yang ada dan hanya dilakukan pencatatan di dalam rekap pengambilan barang, akan sangat menyita waktu terutama pada saat pembuatan laporan, persoalan lainnya yakni adanya aset/barang yang berpindah-pindah ruangan sehingga tidak diketahui keberadaannya dan berdampak pada catatan pengelolaan aset yang tidak menunjukkan data riil di lapangan, dan sumber daya manusia (SDM) pengelola barang milik negara (BMN) yang masih sangat minim akibatnya penatausahaan barang milik negara tersebut kurang efektif, kurangnya pemahaman pengelolaan barang milik negara serta didukung kurangnya kesadaran para pengguna barang dalam hal pengamanan barang milik negara sehingga barang mudah berpindah-pindah. Tidak adanya koordinasi yang baik sebagai akibat komunikasi tidak

berjalan secara baik sehingga mengakibatkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) tidak pernah disampaikan dan akan mempengaruhi data aset/barang di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat.

Idealnya setiap organisasi perlu memperhatikan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang yang baik dan benar untuk mencegah timbulnya pemborosan barang milik/kekayaan Negara. Pentingnya pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) itu sendiri sangat menunjang kepada keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketatausahaan sebuah kantor. Disebut kantor mempunyai begitu banyak aset tetap (Barang Milik Negara) yang harus dikelola dengan baik yang artinya aset-aset tersebut akan menjadi bermanfaat dan menguntungkan yang harus terjaga dan pelaksanaannya yang ditetapkan di bagian ini harus memiliki keahlian di bidang perkantoran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Dengan tipe penelitian deskriptif. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada obyek penelitian yakni diperoleh melalui wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Kasubag Inventarisasi Penyimpanan, dan Pendistribusian, Kasubag Analisis Kebutuhan dan Administrasi Pengadaan, Kasubag Perencanaan dan pelaporan, serta staf inventarisasi penyimpan dan distribusi barang. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait implementasi pengelolaan inventaris dan penggunaan barang pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi ke 33 sebelum Kalimantan Utara pada tahun 2004 Biro Umum dan Perlengkapan sudah ada di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dibawah pimpinan Absul Mannang, S.Sos. dan digantikan Ahmad Appa pada tahun 2007, setelah itu Biro Umum dan Perlengkapan berganti nama menjadi hanya Biro Umum. Dan pada tahun 2014 berubah nama kembali menjadi Biro Umum dan Perlengkapan dibawah pimpinan Safaruddin, S.Sos., M.AP. kemudian pada tahun 2018 setelah satu tahun pergantian Gubernur Sulawesi Barat Biro Umum dan Perlengkapan kini bertambah namanya setelah Sub Bagiannya bertambah dengan masuknya Sub Bagian Protokol masuk ke Biro Umum dan Perlengkapan, berubah menjadi Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol di bawah pimpinan Syarifuddin dari tahun 2019 hingga sekarang.

Adapun Visi dari Biro Umum, Perlengkapan, dan Protokol, yaitu: Terwujudnya Pelayanan Prima di bidang Administrasi keuangan dan Penatausahaan, kerumahtanggaan serta penyediaan Sarana dan Prasarana untuk menunjang Tugas Pokok Sekretariat

Daerah. Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan misi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut: 1) Mewujudkan Pelayanan Administrasi Keuangan yang cepat, tertib dan akuntabel. 2) Mewujudkan Pelayanan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur yang tertib dan cermat. 3) Mewujudkan Pelayanan Kerumahtanggaan yang tepat, cepat dan efisien.

Komunikasi

Model implementasi kebijakan Edward III ini adalah model Top Down, yang berarti dalam dimensi komunikasi fokus utama yang dimaksud adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah secara integral dari semua unit kerja di kantor Biro Umum dan Perlengkapan dalam implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara, serta untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan khususnya bagi pelaksana barang yang menangani Barang Milik Negara, oleh karena itu perlu diciptakan komunikasi kebijakan baik. Pertemuan-pertemuan rutin seperti rapat koordinasi antara pengelola BMN dengan para pejabat pengguna Barang Milik Negara yang ada di Kantor biro

Umum dan Perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat sudah dilakukan baik dalam acara formal maupun informal. Pengguna Barang Milik Negara dan Pelaksana Barang Milik Negara sudah sering melakukan komunikasi yang terimplimentasi dalam sebuah rapat, bahkan setiap kali ada rapat selalu disampaikan dalam forum tersebut seluruh kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara khususnya yang diakibatkan karena belum terciptanya komunikasi yang baik.

Masalah utama dalam penerapan komunikasi yang dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara adalah belum terjadinya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pengelola aset dan Barang Milik Negara dengan Pengguna Barang Milik Negara terkait sering dipindah-pindahkan barang/ aset oleh pengguna Barang Milik Negara. Yang mana seharusnya terlebih dahulu dilaksanakan pelaporan dan koordinasi terkait rencana perpindahan Barang Milik Negara sebelum dilaksanakannya pemindahan Barang Milik Negara tersebut.

Saat ini, Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara selaku pelaksana aktif dalam pengelolaan aset dan Barang Milik

Negara di Kantor biro Umum dan Perlengkapan terus menerus melakukan komunikasi koordinasi dan kerjasama antar bagian dan antara semua unsur pengelolaan Barang Milik Negara, demi terwujudnya sebuah pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib administrasi, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski hal tersebut tidak mudah, namun Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara terus berkomitmen untuk mewujudkan komunikasi yang baik tersebut dengan berbagai upaya.

Sumber Daya

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2011) sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan, yang terdiri dari: a). Staf; b). Informasi; c). Wewenang; d). Fasilitas.

Sumberdaya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan keberhasilan dan sebuah proses pada pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara. Begitu juga yang dialami Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara saatt ini, yang mana faktor sumber daya manusia yang menjadi permasalahan

pokok dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan, maka dari itu faktor sumber daya ini harus mendapat prioritas lebih supaya kinerja Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara bisa menjadi lebih optimal. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis terhadap pelaksana pada Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara khususnya bagian inventarisasi di dapat informasi bahwa Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sekarang memang dirasa masih kurang memenuhi harapan dan ekspektasi institusi. Dikarenakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara yang berjumlah sangat banyak di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan tentunya tidak dapat dilakukan oleh sedikit orang, akan tetapi harus banyak atau cukup orang yang melaksanakan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara itu sendiri.

Fakta yang ditemukan penulis adalah Jumlah sumber daya aparatur sekarang jika dibandingkan dengan jumlah aset dan jumlah tugas yang dimiliki oleh Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sekarang tentunya masih belum ideal,

maka dari itu perlu dilaksanakan penambahan dan perekrutan aparatur baru untuk menunjang dan mendukung keberhasilan proses Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di Kantor Biro umum dan Perlengkapan. Selain Sumber Daya Aparatur, Sumber daya Infrastruktur sebagai Penunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan aset dan BMN di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan juga harus dipenuhi dan mendapatkan perhatian lebih. Infrastruktur pada Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara masih tergolong baik dan mengikuti perkembangan zaman.

Disposisi

Disposisi atau biasa dikenal dengan sikap pelaksana merupakan hal yang mutlak harus ditumbuhkan pada pribadi masing-masing pengelola aset dan Barang Milik Negara di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan dan kesuksesan implementasi kebijakan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan sangat bergantung kepada baik dan tidaknya sikap para pelaksananya ataupun pengelolanya untuk mensukseskan dan mengoptimalkan implementasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kasubagian Perencanaan dan Pelaporan barang didapati hasil bahwa sikap pelaksana yang harus dimiliki oleh pengelola asset dan BMN di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan adalah Kesadaran pada lingkungan kerja, Kemauan bekerja yang besar, Pengetahuan yang cukup terhadap tugas dan fungsinya, Keinginan berprestasi, dan Motivasi bekerja tinggi.

Sikap tersebut harus di tumbuhkan berkembang menjadi sebuah tabiat bersama sehingga tujuan visi dan misi lembaga dapat tercapai secara utuh. Meskipun dengan didukung sumber daya infrastruktur yang terbaik, meskipun juga didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berpendidikan tinggi dan berkualifikasi tinggi, meskipun juga didukung oleh struktur birokrasi yang dapat membagi tugas secara merata, akan tetapi jika pelaksananya tidak memiliki sikap yang baik maka semua pekerjaan dan proses pengelolaan aset dan Barang Milik Negara tidak akan tidak akan terlaksana dengan maksimal.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap sukses dan tidaknya implementasi kebijakan. Maka dari itu Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses dan hasil dari implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan. Karena struktur birokrasilah yang menentukan pembagian-pembagian tugas pada sebuah unit ataupun instansi guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing masing. Struktur birokrasi juga yang membedakan bagian satu dengan bagian lainnya dalam mewujudkan visi dan misi sebuah Instansi seperti di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis terhadap Pelaksana pada Kasubagian administrasi pengadaan Barang Milik Negara, di dapati hasil bahwa struktur birokrasi yang ada di Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kantor Biro Umum dan Perlengkapan masih belum optimal. Dikarenakan masih ada terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi antara Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Umum. Beberapa kali terjadi kesalahpahaman antara kedua unit tersebut yang mengakibatkan

ketidaknyamanan antara masing masing pelaksana. Alasan yang kedua adalah dikarenakan struktur birokrasi yang ada di Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara masih belum membagi tugas tugasnya secara proposional dan ideal. yang hanya mengandalkan pembagian tugas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai topik dalam skripsi ini sebagaimana telah dijabarkan dan dijelaskan mengenai serangkaian proses implementasi sistem pengelolaan inventaris dan penggunaan barang di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Masalah utama dalam hal ini komunikasi yang di laksanakan oleh Kantor Biro Umum dan perlengkapan adalah belum terjadinya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengelola asset dan Barang Milik Negara Kantor Biro Umum dan Perlengkapan dengan pengguna Barang Milik Negara terkait sering dilakukannya pemindahan barang yang mana seharusnya terkebih dahulu melaporkan terkait rencana perpindahan barang Milik Negara tadi sebelum dilaksanakannya pemindahan barang tersebut.

Masalah pokok yang dialami oleh Bagian Perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara dalam pengelolaan asset dan barang adalah kekurangan sumber daya aparatur. Hampir pada setiap tahapan pengelolaan asset dan barang milik Negara di Kantor Biro Umum dan Perlengkapan disebabkan karen kekurangan sumber daya aparatur, baik itu dalam segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah sumber daya aparatur sekarang jika dibandingkan dengan jenis dan jumlah asset dan Barang Milik Negara serta beban pekerjaan masih belum ideal.

Disposisi dan sikap pelaksana yang berada di intern Bagian perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara tergolong baik, patuh, taat dan loyal terhadap tugas yang sudah di berikan terkait pelaksanaan pengelolaan asset dan Barang Milik Negara. Namun, pada bagian-bagian lain ataupun unsur-unsur terkait, masih ditemukannya oknum yang belum memiliki komitmen yang sama untuk mensukseskan proses pelaksanaan pengelolaan asset dan Barang Milik Negara. Tidak bisa di pungkiri bahwa memang ada oknum yang ada diluar bagian perlengkapan masih kurang peduli dengan Barang Milik Negara yang ada di Kantor Biro Umum dan perlengkapan.

Struktur Birokrasi yang ada masih belum bisa mengoptimalkan kinerja. Karena struktur birokrasi yang ada masih belum membagi tugas-tugasnya secara proporsional dan ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Astari, Rima. 2013. *Manajemen Pengelolaan Inventarisasi Guna Menunjang Aktifitas Perbekalan di Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).
- Bafadal, Ibrahim. 2004. *Manajemen Perlengkapan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William. 2009. *Pengantar Analisis kebijakan publik, edisi keempat*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Dwiantara dan Sumarno. 2009. *Manajemen Logistik*. Jakarta: Grasindo.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34.
- Hamdi, A.S. 2014. *Metode penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prendamedia Group.
- Jogiyanto. 2005. *Analisa dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kapioru. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Peayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 3(1).
- Majid. 2014. *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit andi.
- Matin dan Fuad. 2016. *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Naditya, dkk. 2013. Implementasi Strategi Pembelajaran Inkuiri terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Dan Pemahaman Konsep Siswa. *Jurnal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Vol 3*.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nurhanifah. 2015. *Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa* (Skripsi, Universitas Islam Bandung).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pratama, Rezky, 2015. Implementasi Peraturan daerah nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan sampah di kelurahan sidodadi Kecamatan Samarinda. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 3(1).
- Siagian, P Sondang. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Soleh dan Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Yang Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokus media.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, Mhd dan Isril. Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2).
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.